

T O P I K

Kecenderungan dan Tantangan Industrialisasi Indonesia Menjelang Tahun 2000

Rizal Ramli

Transformasi dan Kinerja Industrialisasi Indonesia

Industrialisasi Indonesia sepanjang PJPT I telah berhasil mendorong terjadinya transformasi struktural dalam ekonomi Indonesia. Peranan dominan sektor pertanian pada awal PJPT I telah berhasil digantikan oleh semakin pentingnya peranan industri manufaktur. Sampai dengan akhir tahun 1995, kontribusi manufaktur terhadap GDP telah mencapai 24,3% melewati kontribusi sektor pertanian yang hanya mencapai 17% dari GDP. Dari segi penyediaan lapangan kerja, juga telah terjadi transformasi struktural. Pertumbuhan daya serap tenaga kerja sektor manufaktur telah melewati kecepatan pertumbuhan daya serap sektor pertanian.

Jika dilihat dari kacamata historis, strategi dan kebijaksanaan yang diambil memang berhasil mendorong terjadinya transformasi struktural, baik dari segi pergeseran sektoral maupun penyerapan tenaga kerja. Hanya saja, jika kita menggunakan pendekatan komparatif (*cross-country comparison*), terlihat perbedaan kinerja industrialisasi yang cukup mencolok terutama jika dibandingkan dengan negara-negara macan Asia seperti : Korea, Taiwan, Singapura dan Thailand (lihat Tabel 1 dan 2)

Negara-negara macan Asia tersebut memiliki GNP per kapita dan tingkat industrialisasi yang tidak jauh berbeda

dengan Indonesia pada tahun 1960-an. Tetapi setelah 30 tahun negara-negara macan Asia tersebut ternyata memiliki GNP perkapita dan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi daripada Indonesia.

Sejumlah indikator dapat digunakan untuk memperbandingkan kinerja industrialisasi diantara negara-negara macan Asia (sebagian dimuat dalam Tabel :1)

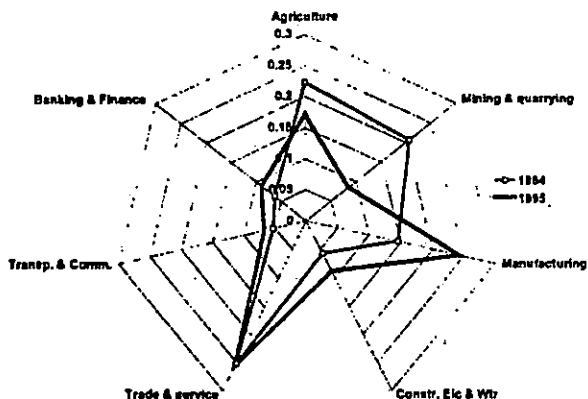
1. Kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP atau rasio antara *output* sektor manufaktur terhadap sektor pertanian.
2. *Output* manufaktur perkapita.
3. Sektor manufaktur perkapita
4. Kontribusi *light* manufaktur terhadap total *output* manufaktur
5. Kedalaman struktur industri dalam bentuk kontribusi barang modal dan bahan baku dalam *output* industri rasio antara nilai tambah per *output*.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 30 tahun, kinerja industrialisasi Indonesia relatif tinggi dari negara-negara macan Asia lainnya. Salah satu indikator tidak langsung yang berkaitan dengan kinerja industrialisasi adalah kemampuan industrialisasi untuk menyedot *surplus labor* yang berasal dari sektor pertanian dan pedesaan. Dari segi ini, proses industrialisasi di seluruh negara-negara macan Asia (Korea, Taiwan, Singapura, Thailand dan Malaysia) telah berhasil menyedot *surplus labor* dalam ekonomi sehingga mereka telah melewati

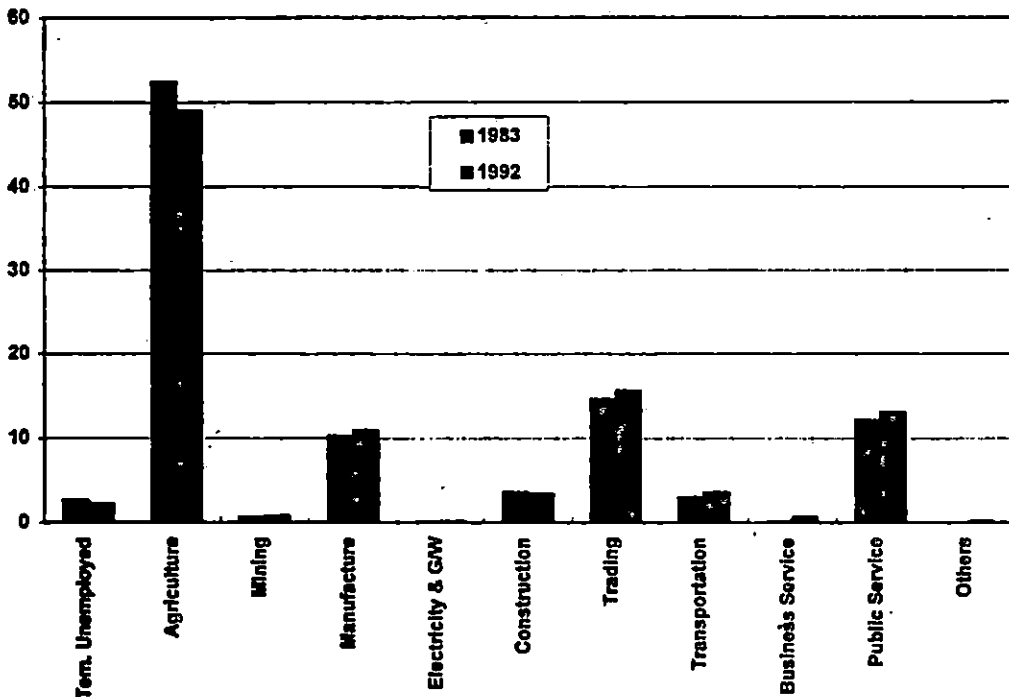
the turning point of the labor market (titik dimana permintaan tenaga kerja melebihi pasok). Pada kondisi seperti itu, negara-negara macam Asia tersebut mulai mengalami kekurangan pasok tenaga kerja (*labor shortage*) pada hampir semua

segmen pasar. Dalam kondisi seperti itu tidak aneh bahwa kenaikan tingkat upah berlangsung secara lebih alamiah, tanpa perlu kenaikan upah melalui regulasi UMR, dan sejalan dengan kenaikan produktivitas.

Grafik 1 : Kontribusi Sektor Industri terhadap GDP Semakin Besar



Grafik 2 : Share of Labor Absorption by Sector (percent)



Tabel 1 : Cross - Country Comparison of Industrialization

Industry	GNP per Capita US \$ 1994	Manufacturing Growth real annual average (%)		Manufacturing Output 1994 as % of		Manufacturing Output 1994		Manufactured Exports 1994		
		1965-80	1980	GDP 93	Agricul ture	(million US \$)	Per Capita (US\$)	As % of total exports	Per Capita (US \$)	Textiles fibers textiles and clothing as % of total*)
Indonesia	880	12.0	11.8	24	141	41,914	221	53	112	14
Malaysia	3,480	11.7	10.3	32	229	22,600	1,130	70	2,056	5
Philippines	950	7.5	0.8	23	105	14,757	220	76	151	8
Thailand	2,410	11.2	10.8	29	290	41,531	716	73	570	12
Singapore	22,010	9.7	7.2	27	n.a	18,616	1,241	80	5,163	n.a
Korea	8,260	18.7	12.3	29	414	109,186	2,482	93	2,029	16

*) 1993 data
Source : World Bank Report

Tabel 2 : GNP per Capita (Current US\$)

	1960	1975	1984	1992
Indonesia	60	215	540	670
South Korea	80	243	2.044	6.790
Taiwan	153	387	3.091	10.359

Selain disebabkan oleh tingginya intensitas modal dalam proses industrialisasi, kapasitas industrialisasi Indonesia untuk menyedot tenaga kerja yang relatif rendah juga terjadi sebagai akibat alokasi sumber daya yang belum optimum, dan rendahnya keterkaitan ekonomis (*economic linkages*) antara industri skala besar, menengah dan kecil di Indonesia relatif terhadap negara-negara macan Asia lainnya (lihat grafik 3). Sebaliknya, di negara-negara macan Asia lainnya, keterkaitan ekonomis tersebut relatif sangat kuat sehingga daya serap tenaga kerja dari proses industrialisasi menjadi lebih tinggi.

Rendahnya keterkaitan ekonomis tersebut membawa sejumlah dampak :

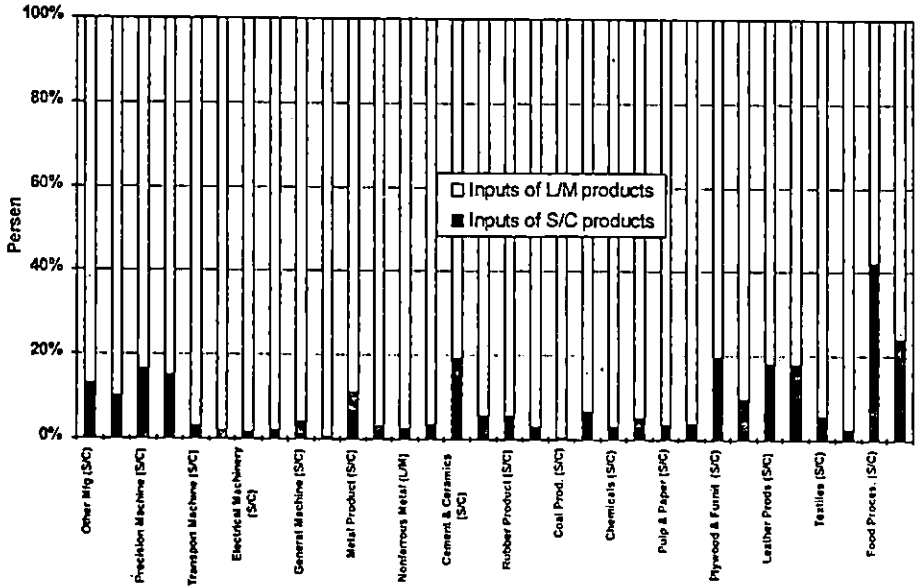
1. Keterkaitan ekonomis yang rendah mengakibatkan rendahnya daya serap tenaga kerja dari proses industrialisasi karena industri skala menengah dan

kecil memiliki daya serap tenaga kerja yang lebih tinggi.

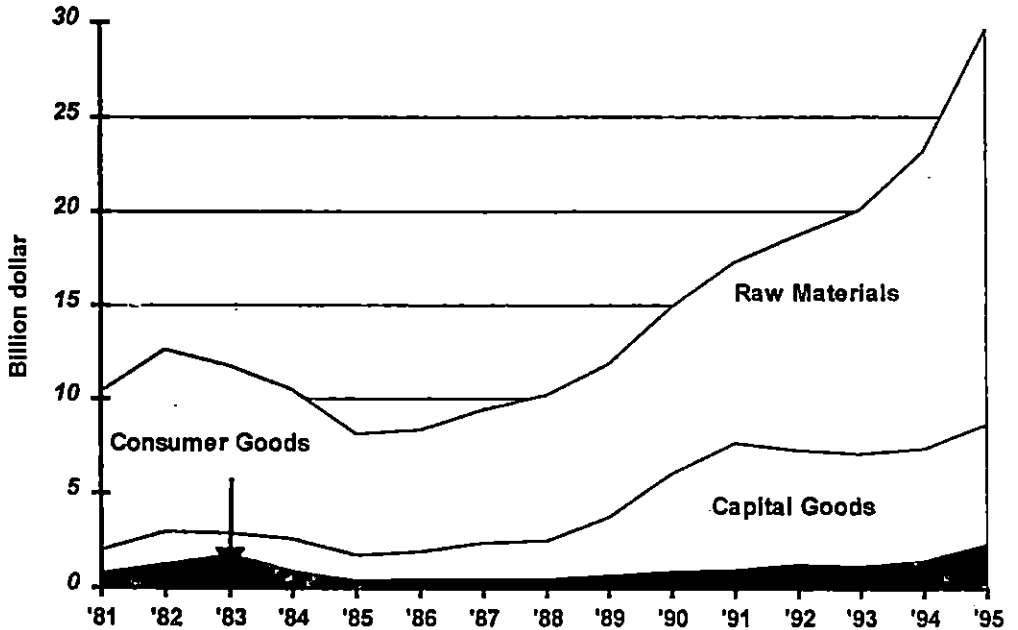
2. Keterkaitan ekonomis yang rendah tersebut menyebabkan kandungan impor yang sangat tinggi dari setiap *output* industri (lihat grafik 4) sehingga nilai tambah per *output* juga relatif rendah.
3. Pertumbuhan sektor manufaktur yang relatif tinggi tidak membawa dampak pengganda (*multiplier effects*) yang besar dalam bentuk nilai tambah, lapangan kerja dan distribusi pendapatan.

Menjadi pertanyaan, mengapa jika kita menggunakan pendekatan komparatif (*cross country comparison*) kinerja industrialisasi Indonesia tidak sehebat negara-negara Macan Asia lainnya ? Padahal dari segi dukungan sumber daya, baik hasil eksploitasi sumber daya alam selama PJPT I (minyak bumi dan hutan)

Grafik 3 : Rendahnya Keterkaitan Ekonomi Industri Besar, Sedang dan Kecil Berdasarkan Input/Output 1980



Grafik 4 : Sebagian Besar Impor Indonesia Merupakan Bahan Baku/Penolong Industri



serta pinjaman luar negeri, Indonesia melebihi negara-negara macan Asia lainnya. Terdapat sejumlah kemungkinan jawaban yang perlu dikaji lebih lanjut :

1. Indonesia terlambat melakukan reorientasi strategi industrialisasi dari orientasi substitusi impor menjadi orientasi ekspor. negara-negara macan Asia lainnya telah melakukan reorientasi strategi industrialisasi pada pertengahan tahun 1970-an. Sementara Indonesia baru memulai reorientasi strategi industrialisasi pada pertengahan tahun 1980-an, pada saat harga minyak bumi turun dratis di pasar dunia. Keterlambatan dari orientasi strategi industrialisasi tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas industri nasional.
2. Alokasi sumber daya tidak optimum karena proses *decision making* dalam ekonomi masih sering bersifat *ad hoc* dan sering dipengaruhi oleh kelompok kepentingan (*vested interests*). *Rasional decision making* sangat dibatasi oleh berbagai *vested interests* sehingga menjadi apa yang dikenal dengan *decision making dalam bounded rationality (rasionalisme terkungkung)*. Dalam *bounded rationality* tersebut, pilihan-pilihan kebijaksanaan terbatas hanya pada *second to fifth best choices*, atau bahkan status quo dinilai sebagai *best policy choice*.

Peluang dan Tantangan Liberalisasi

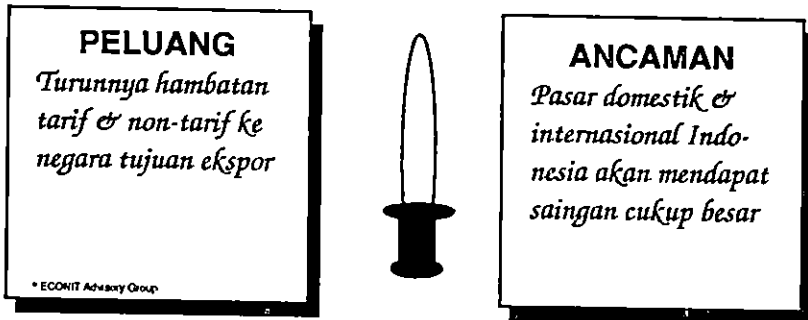
Pada saat Indonesia masih memerlukan waktu untuk mengejar ketinggalannya terutama di sektor industri, kita dihadapkan dengan tekanan liberalisasi perdagangan, industri dan keuangan yang berskala global maupun regional (GATT, APEC, AFTA, dsb) Liberalisasi merupakan peluang (*opportunities*) karena penurunan hambatan tarif dan non tarif akan meningkatkan volume

dan nilai perdagangan internasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa Cina merupakan negara yang berpeluang paling besar untuk menarik manfaat dari leberalisasi perdagangan seperti kesepakatan GATT. Studi-studi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menarik manfaat ekonomis dari liberalisasi, seperti GATT dan AFTA. Peluang tersebut baru menjadi realita jika Indonesia memiliki strategi dan program yang jelas untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Jika dilihat dari pengalaman setelah dua tahun kesepakatan GATT (15 April 1994) dan 3 tahun kesepakatan AFTA, tampak jelas bahwa peluang yang tersedia tersebut nyaris identik dengan *missed-opportunity* (peluang yang nyaris hilang) seperti terlihat dari segi pertumbuhan ekspor dan penurunan pangsa pasar Indonesia.

Dari segi lain, liberalisasi perdagangan internasional dalam barang dan jasa juga merupakan suatu ancaman (*threat*) karena Indonesia akan menghadapi persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor. Indikasi ancaman persaingan yang semakin meningkat tersebut sudah mulai tampak dalam bentuk peningkatan impor yang semakin bervariasi dengan nilai yang semakin tinggi, dan merosotnya pangsa pasar produk Indoensia di bebrapa negara paartner dagang utama. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, Indonesia akan semakin penting sebagai negara konsumen dan semakin marginal peranannya sebagai negara produsen. Jelas bahwa kondisi seperti itu tidak *sustainable* karena konsumsi tidak akan dapat terus berlanjut tanpa produksi (*tangibles* maupun *intangibles*). Jika *worst scenario* itu yang terjadi, Indonesia akan menjadi korban (*victim*) dan bukan penarik manfaat (*benefactor*) dari liberalisasi.

Apakah yang perlu dilakukan jika Indonesia ingin menjadi penarik-manfaat

Gambar 5 Tantangan di Masa Depan : Liberalisasi



dan bukan sekedar korban dari liberalisasi? Berikut ini adalah sejumlah langkah yang diperlukan jika Indonesia ingin menjadi penarik manfaat dari liberalisasi.

1. Agenda liberalisasi harus merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing diversifikasi produk-produk Indonesia, baik di pasar dalam maupun luar negeri. Agenda liberalisasi yang hanya didorong oleh faktor-faktor luar (*externally-driven liberalization*) dapat menghasilkan dampak yang tidak diharapkan. Negara-negara asing maupun lembaga-lembaga multilateral yang mendorong proses liberalisasi mempunyai agenda sendiri dan sering melupakan *cost of adjustment* yang harus dibayar oleh negara berkembang seperti Indonesia.
2. Agenda liberalisasi yang merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing dan diversifikasi produk Indonesia harus merupakan hasil analisa dari kekuatan dan kelemahan ekonomi nasional, baik pada level struktural maupun sektoral, relatif terhadap kompetitor potensial. barulah setelah itu dirumuskan suatu agenda liberalisasi yang berlandaskan kemampuan dan tahapan ekonomi nasional (*internally-driven liberalization*), termasuk didalamnya perkiraan terhadap *cost of adjustment* terhadap sektor sektor yang perlu menyesuaikan

diri serta plan of actions untuk mengurangi biaya penyesuaian tersebut.

Dalam kaitan kedua kaidah tersebut di atas, tidaklah aneh bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina dan bahkan Malaysia, sangat hati-hati dalam menyetujui jadwal liberalisasi yang ditetapkan oleh APEC. Antusiasme Indonesia yang berlebihan dalam menyetujui jadwal liberalisasi seperti APEC, tanpa didukung oleh strategi bersaing yang sistematis, dapat mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan dan bahkan back-fired.

Dalam iklim global yang semakin kompetitif, akibat liberalisasi perdagangan dan finansial, pemenang kompetisi di pasar barang dan jasa sangat ditentukan oleh (1) kompetisi harga (*price competition*), serta (2) kompetisi non-harga (*non-price competition*) seperti kualitas, kenyamanan, variasi dan diversifikasi produk, serta pelayanan penjualan dan purna penjualan (*sales and after sales services*).

Untuk sebagian besar komoditi pertanian dan industri, ternyata bahwa struktur biaya produk Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara kompetitor potensial. Salah satu indikator kasar yang dapat digunakan untuk membandingkan struktur biaya adalah indeks harga grosir (*wholesale price index*) untuk pertanian dan industri.

Dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Thailand, yang merupakan salah satu pesaing utama Indonesia, *Wholesale Price Index* untuk produk industri dan pertanian Indonesia sangat tinggi (lihat Grafik 6 dan 7)

Disamping relatif tinggi, *wholesale price indexes* untuk produk industri dan pertanian menunjukkan kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir. Padahal di negara lain seperti thailand terjadi penurunan. Sementara itu *wholesale price indexes* dunia secara keseluruhan, seperti diperlihatkan pada Grafik 6 dan 7, memperlihatkan kecenderungan relatif stagnan.

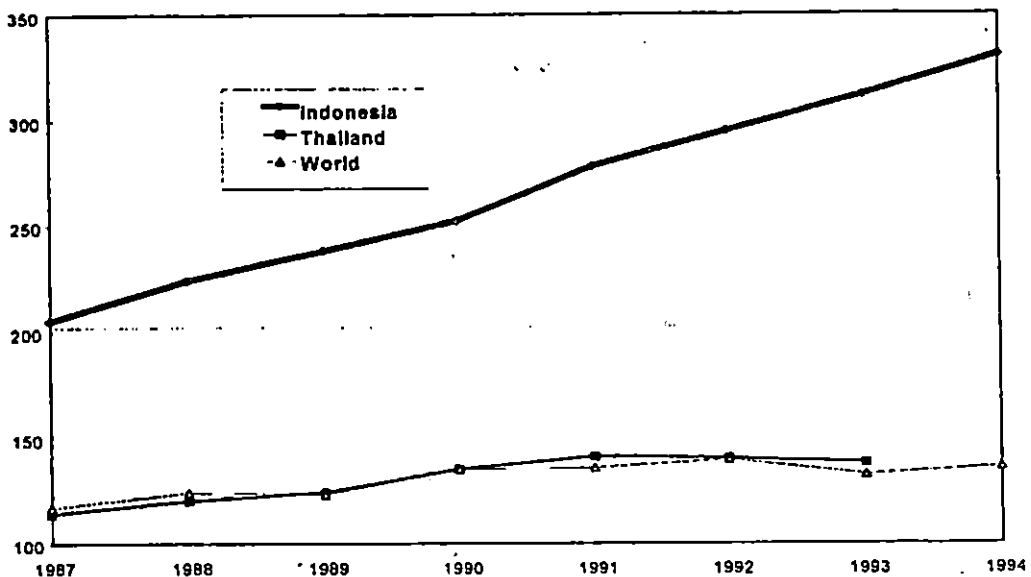
Kecenderungan struktur biaya yang tinggi dan terus meningkat tersebut sebetulnya merupakan akibat dari berbagai faktor seperti :

1. Tingginya "biaya lain-lain" dalam struktur biaya produksi Indonesia,

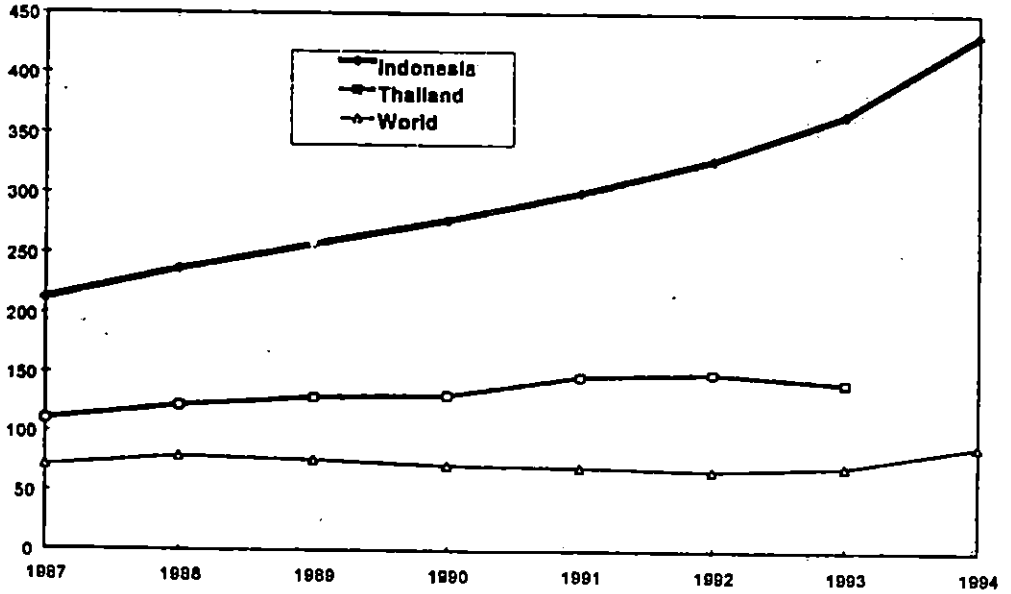
Sebagai contoh "biaya lain-lain" dalam industri manufaktur secara rata-rata mencapai 13,9% dari struktur biaya (lihat grafik 8). Untuk sejumlah sub-sektor manufaktur, "biaya lain-lain" tersebut sering lebih tinggi dari biaya untuk tenaga kerja. Di samping biaya-biaya tidak resmi dan informal dalam investasi dan proses produksi. Besarnya "biaya lain-lain" tersebut merupakan indikator apa yang dikenal dengan istilah ekonomi biaya tinggi.

2. Tingkat konsentrasi industri yang sangat tinggi di Indonesia (lihat grafik 9 dan 10), akibat *regulated commodities* (komoditi komando) seperti terigu, semen, dsb dan tidak adanya hambatan terhadap integrasi vertikal maupun horisontal. Penguasaan jalur produksi dari hulu ke hilir serta jalur pemasaran dari tingkat grosir sampai pengecer mengakibatkan rigiditas harga pada

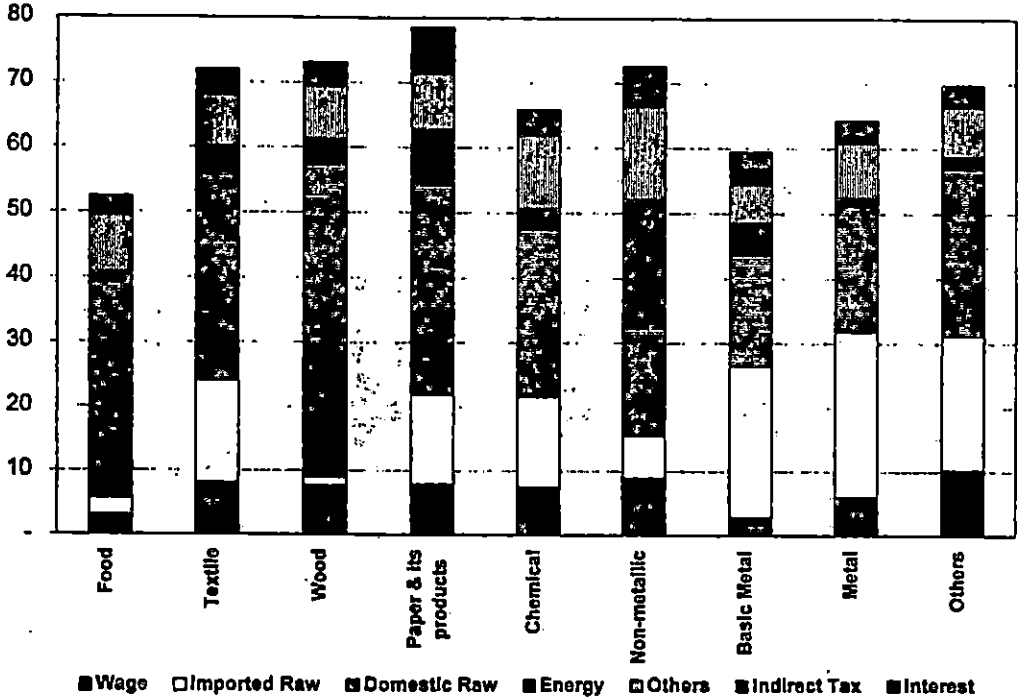
Grafik 6 : Wholesale Price Index of Industrial Commodities (1980 = 100)



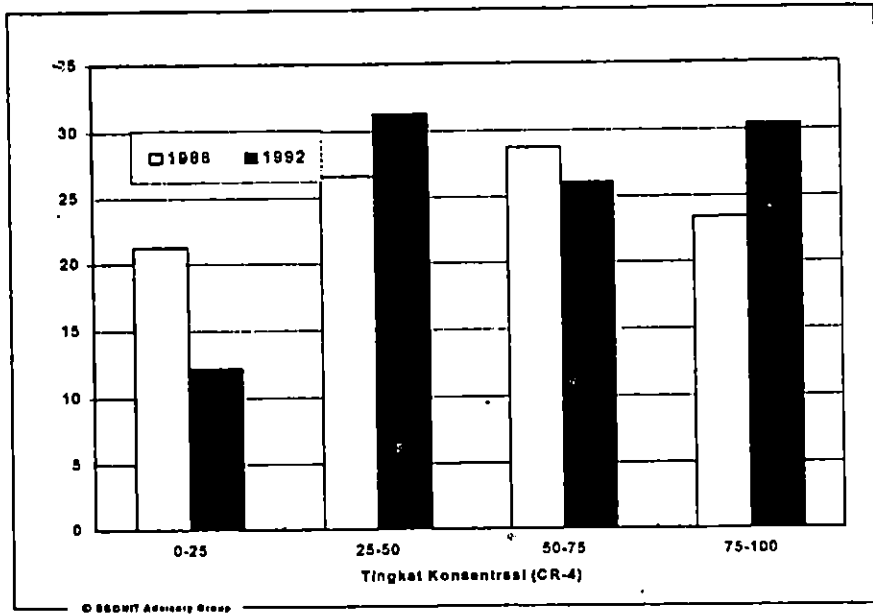
Grafik 7 : Wholesale Price Index of Agricultural Commodities (1980.= 100)



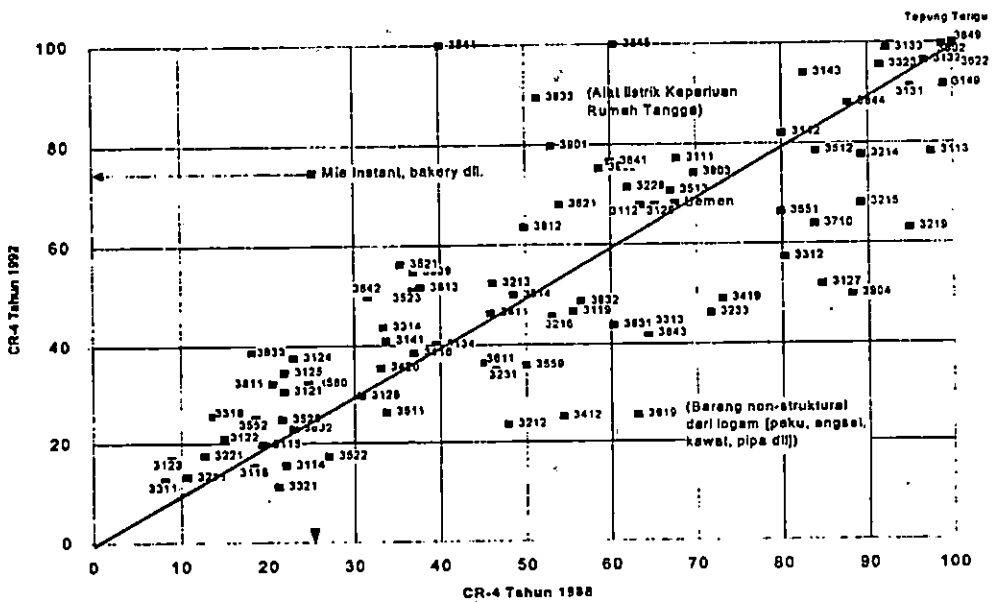
Grafik 8 : Struktur Biaya Industri Perakitan Indonesia (1993)



Grafik 9 : Perubahan Komposisi Tingkat Konsentrasi Industri Manufaktur 1988-1992



Grafik 10 : Perkembangan Tingkat Konsentrasi Industri Tahun 1988-1992



sebagian besar produk manufaktur Indonesia.

Pada tahap-tahap awal industrialisasi dan ekspor, seperti yang terlihat dalam pengalaman Jepang, Korea dan Taiwan, kompetisi produk ekspor hanya didasarkan atas kompetisi harga. Pada tahap lebih lanjut, untuk memperbesar pangsa pasar dan meraih nilai tambah yang lebih tinggi, kompetisi non-harga memainkan peranan semakin penting. Analisa dari segi kompetisi non-harga (*non-price competition*) seperti kualitas, kenyamanan variasi dan diversifikasi produk, serta pelayanan penjualan dan purna - penjualan (*sales and after sales services*), menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia masih banyak memerlukan berbagai perbaikan.

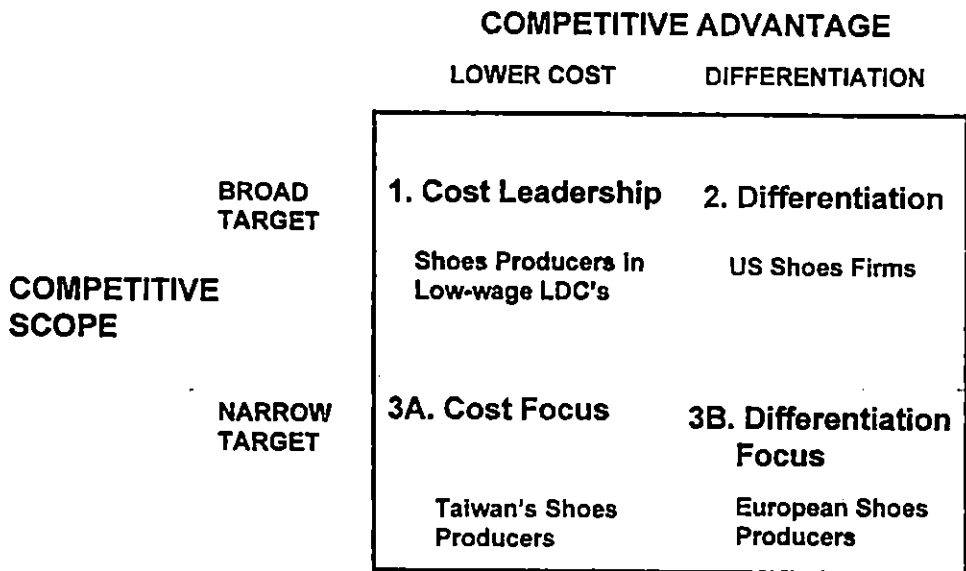
Apakah Deregulasi Merupakan Jawaban Bagi semua Masalah (Panacea) yang Disebutkan Di atas ?

Banyak pendapat populer yang menyatakan bahwa deregulasi merupakan

obat untuk segala macam penyakit ekonomi Indonesia. Dengan kata lain deregulasi adalah sebuah *panacea*. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, banyak kasus pendekatan populer yang misleading. Secara teoritis, deregulasi sektor riil seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomis dalam bentuk peningkatan efisiensi dan produktivitas sehingga mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian juga deregulasi diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam bentuk penurunan harga dan tingkat inflasi. Deregulasi sektor riil yang dilakukan selama ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. deregulasi dibidang investasi
2. deregulasi administratif (perizinan, prosedur dsb)
3. deregulasi tarif dan non-tarif (tata niaga, quota, lisensi dsb).

Grafik 11 : Porter's Competitive Strategy



Deregulasi Investasi

Sebagai akibat dari deregulasi PP 20 (2 Juni 1994), iklim investasi di Indonesia termasuk yang paling liberal di dunia. Deregulasi yang cukup liberal tersebut memang telah berhasil meningkatkan jumlah investasi asing di Indonesia. Harus diakui bahwa investasi asing mempunyai banyak manfaat untuk ekonomi Indonesia, akan tetapi tanpa perencanaan yang hati-hati, kehadiran investor asing tersebut justru dapat menggeser keberadaan dan kesempatan untuk pelaku ekonomi domestik. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan jika dilihat ternyata kebanyakan investasi asing tersebut bukan untuk tujuan ekspor, akan tetapi justru lebih diorientasikan untuk merebut pasar dalam negeri.

Sebagai contoh, rencana investasi PMA di sektor industri pada tahun 1995 didominasi oleh sub-sektor infrastruktur dan kimia. Sampai kuartal I/1996, meskipun prosentase jumlah proyek investasi PMA yang berorientasi ekspor tidak bergerak jauh di angka 63 %, tetapi laju nilai investasinya mengalami penurunan dratis pada hampir semua sektor. Komposisi PMA yang berorientasi

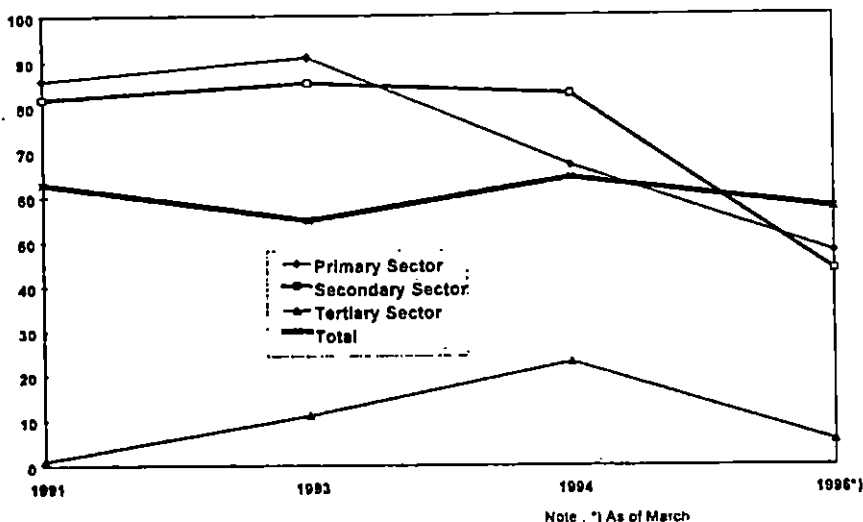
ekspor turun dari 64% pada tahun 1994 menjadi hanya 32% pada kuartal I/1996. Komposisi PMA sektor industri berorientasi ekspor yang mencapai 83% pada tahun 1994, pada kuartal I/1996 turun dratis sampai 44%; angka terendah selama 5 tahun terakhir (lihat Grafik 12).

Komposisi PMA yang berorientasi ekspor turun dari 64% pada tahun 1994 menjadi hanya 57% pada tahun 1995. Komposisi PMA sektor industri berorientasi ekspor yang mencapai 82% pada tahun 1994, pada kuartal I/1996 turun dratis sampai 43%; angka yang terendah selama 5 tahun terakhir. Dengan kecenderungan seperti ini jelas bahwa sebagian besar PMA semakin ditujukan pada pasar domestik (domestic Oriented). Kecenderungan ini merupakan faktor yang akan memperbesar defisit transaksi berjalan di masa yang akan datang, bukan menguranginya. Orientasi domestik PMA tersebut, jika terus berlanjut dakan mempersulit transformasi industri ke orientasi ekspor.

Deregulasi Administratif

Efektivitas deregulasi dibidang administratif (perizinan, prosedur dsb)

Grafik 12 : Ratio of Export Oriented FDI to All FDI Projects, Approved (%)



akan sangat bergantung pada kesiapan, kualitas dan perilaku birokrasi di Indonesia. Dalam kenyataannya, deregulasi dibidang administratif seringkali tidak efektif karena apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan keputusan di tingkat atas. Sebagai contoh deregulasi dan desentralisasi perizinan kurang dapat dirasakan manfaatnya karena birokrasi di tingkat bawah maupun di daerah ternyata belum memahami dan berperilaku menyulitkan dunia usaha.

Deregulasi Tarif

Sampai dengan akhir tahun 1990-an deregulasi tarif di Indonesia cukup berhasil meningkatkan efisiensi, daya saing industri, volume produksi dan ekspor. Akan tetapi deregulasi yang dilakukan sejak awal tahun 1990-an sudah memperlihatkan kecenderungan *decreasing benefits* karena tingkat tarif rata-rata yang berlaku sudah relatif rendah (lihat Grafik 13). Dalam kondisi ini, penurunan tarif lebih lanjut tanpa didukung oleh strategi kompetisi yang jelas akan dapat merugikan kepentingan nasional dan hanya akan menguntungkan negara lain karena mereka akan dapat meningkatkan

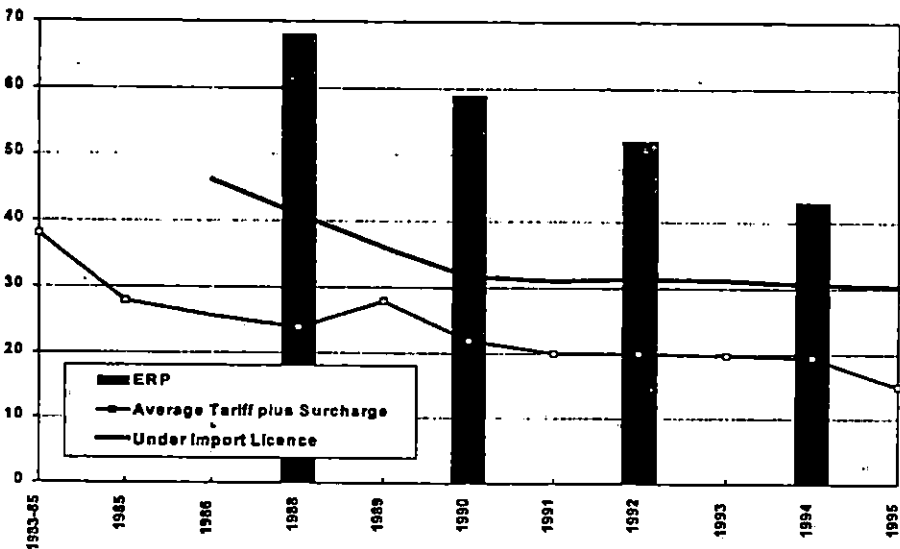
ekspor ke Indonesia.

Deregulasi yang dilakukan akhir-akhir ini kurang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga karena masalah utama yang dihadapi sektor industri Indonesia adalah struktur industri yang semakin terkonsentrasi. Grafik 14 menunjukkan bahwa ternyata banyak sub-sub sektor industri yang tarifnya sudah cukup rendah tetapi struktur industrinya tetap monopolis dan oligopolis karena adanya *barrier of entry* dalam bentuk hambatan non-tarif seperti tata niaga, modal yang besar dan teknologi, dll. Demikian juga konsentrasi industri yang sebagian besar terjadi pada industri hulu mengakibatkan tingginya harga pada produk industri hilir.

Dilihat dari penurunan kinerja ekspor Indonesia, deregulasi tarif juga sudah tidak mampu memperkuat daya saing industri. Hal ini bisa dilihat dari kinerja ekspor beberapa komoditi unggulan dimana pertumbuhannya terus merosot (lihat Grafik 15).

Kinerja ekspor beberapa komoditi unggulan seperti garmen, tekstil & kelapa sawit pada tahun 1995 terus merosot. Pada tahun 1995, ekspor minyak kelapa sawit

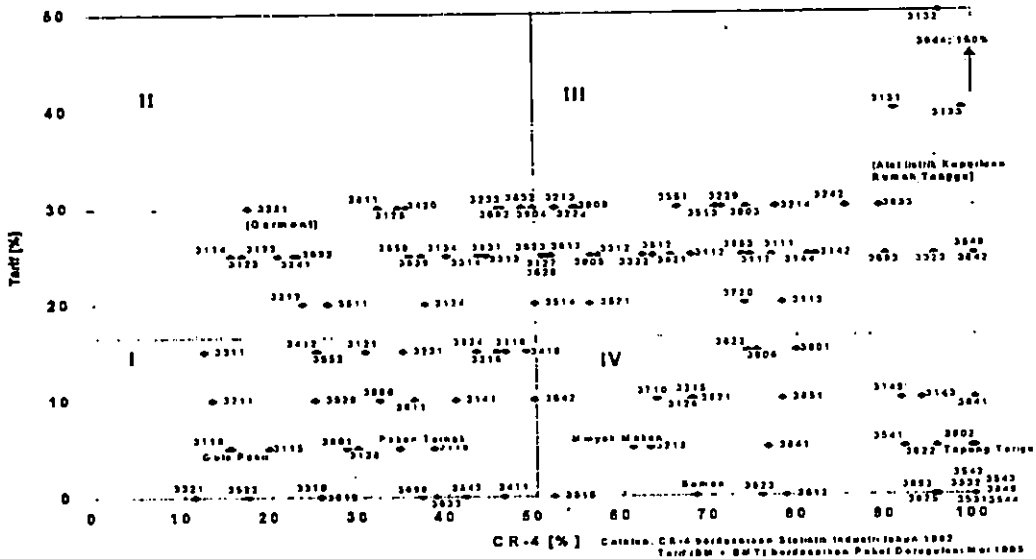
Grafik 13 : Average Tariff Protection



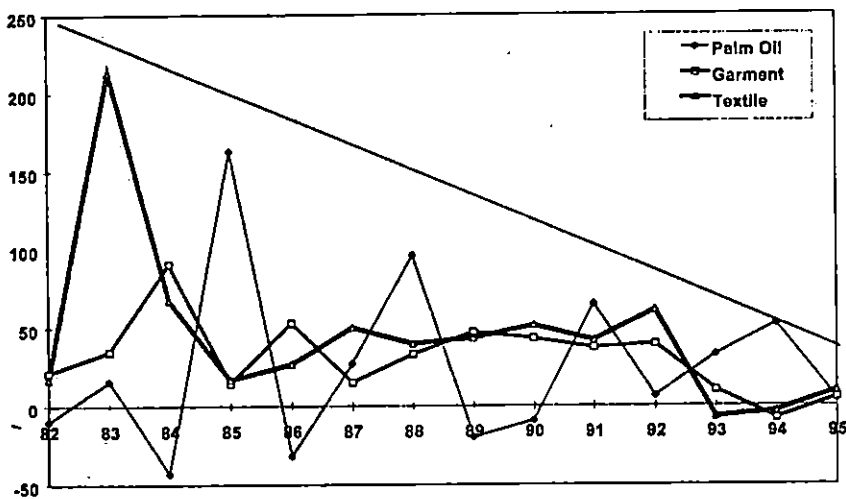
hanya tumbuh 4% (mencapai US\$ 747 juta), jauh lebih rendah dari pertumbuhan

tahun 1994 yang naik 52%. Hal yang sama juga terjadi pada komoditi unggulan

Grafik 14 : (Konsentrasi Ind kuadron)



Grafik 15 : Indonesian Export Growth of Selected Commodities (%)



lainnya, seperti garmen hanya naik 5% menjadi US\$ 3,3 miliar dan tekstil 9% menjadi US\$ 2,8 miliar pada tahun 1995; target pertumbuhan ekspor untuk komoditi unggulan harus di atas 20% karena target rata-rata ekspor adalah 20%.

Perlu dicatat bahwa paket kebijakan deregulasi yang dikeluarkan setelah tahun 1990-an sering lebih bermuatan politis dibandingkan alasan ekonomis yang lebih substansial. Sering kali terjadi bahwa paket-paket deregulasi dikeluarkan menjelang dilaksanakannya sidang CGI (Consultative Group on Indonesia) atau IGGI sehingga timbul kesan bahwa paket-paket tersebut dikeluarkan hanya sebagai *sweetener* untuk mendapatkan pinjaman baru. Disamping itu, paket-paket deregulasi lebih menekankan besarnya jumlah item pos tarif yang diturunkan tanpa mengemukakan *magnitude kuantitatif* dari dampak deregulasi terhadap nilai atau volume komoditas yang diturunkan tarifnya. Dalam banyak kasus, komoditas yang sebenarnya sangat strategis dan oligopolis justru tidak mendapat prioritas deregulasi.

Diperlukan Re-Orientasi Kebijakan di Sektor Industri, Deregulasi bukan Panacea:

Selama ini, deregulasi sering dianggap sebagai "tujuan" dan obat segala jenis penyakit ekonomi. Padahal deregulasi hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan peningkatan efisiensi dan daya saing industri. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini, diperlukan langkah-langkah baru (*new-approach*) disamping deregulasi berdasarkan penurunan tarif. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya-saing ekonomi nasional diperlukan tiga langkah penting yang harus dilakukan:

1. menyusun strategi kompetisi
2. melakukan reformasi struktur industri
3. melakukan debirokratisasi dan desentralisasi.

Seperti yang diungkapkan pada bagian terdahulu, **penurunan efektivitas deregulasi erat kaitannya dengan kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki strategi kompetisi yang jelas.** Pada kondisi saat ini, deregulasi seharusnya hanya merupakan salah satu komponen dari strategi kompetisi. **Ketidakjelasan strategi kompetisi yang berlarut-larut tidak hanya akan berdampak pada hilangnya kesempatan (*lost-opportunity*) tetapi juga akan sangat merugikan (*costly*).**

Salah satu komponen strategi kompetisi adalah reformasi struktur industri, dari yang saat ini sangat terkonsentrasi (oligopolistik) menjadi struktur yang lebih kompetitif. Hanya dengan cara demikian akan terjadi peningkatan efisiensi dan daya saing produk-produk Indonesia. Di samping itu, dengan reformasi struktur industri, rigiditas harga akan berkurang sehingga mendorong penurunan tingkat inflasi. Dengan struktur industri yang lebih kompetitif, maka penentuan tingkat harga akan lebih ditentukan oleh mekanisme pasar. Hanya dengan struktur yang lebih kompetitif upaya deregulasi akan menghasilkan manfaat yang lebih optimal.

Deregulasi di bidang administratif (perizinan, prosedur, dsb) hanya akan efektif jika didukung oleh reformasi birokrasi Indonesia. Dalam kenyataannya, deregulasi di bidang administrasi seringkali tidak efektif karena perilaku dan mekanisme birokrasi tidak mendukung upaya-upaya reformasi. Reformasi birokrasi menyangkut redefinisi fungsi, peran, struktur dan sistem kompensasi birokrasi. Tanpa reformasi birokrasi deregulasi administratif hanyalah merupakan usaha tambal sulam dan artificial yang tidak akan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas birokrasi.